

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

Daftar Isi

Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik di Indonesia: Pengantar Pengembangan Model MSDM Sektor Publik	
Jusuf Irianto.....	281–291
Respons Cina atas Gerakan Pan-Uyghuris di Provinsi Xinjiang	
Baiq L.S.W. Wardhani	292–301
Strategi Meningkatkan Daya Tahan Budaya Lokal dalam Menghadapi Arus Globalisasi	
A. Safril Mubah	302–308
Antara Baju Loreng dan Baju Rombeng: Kontrol Tentara terhadap Rakyat Miskin di Kota Surabaya Tahun 1950-an	
Purnawan Basundoro.....	309–317
Perpolisian Masyarakat dalam Perspektif Habermas	
Bambang Budiono	318–327
Analisis Pola Belanja Wisatawan Kelompok di Kota Batu	
Sri Endah Nurhidayati	328–335
American Press and Decolonization Processes of Indonesia and Indo-China	
I Basis Susilo.....	336–344

Respons Cina atas Gerakan Pan-Uyghuris di Provinsi Xinjiang

Baiq L.S.W. Wardhani¹

Departemen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya

ABSTRACT

There are three significant aspects of China's policy about Uyghurs: identity, natural resources and geography. Uyghur revivalism in Xinjiang province has been one of China's conundrum for more than one century. The wish of its people to establish an independent state has been physically subdued by the Beijing and Beijing has denied the right of self-determination that has been promised for this province since 1950s. Yet, the dreams for freedom keeps alive and sporadically the Uyghurists continue to struggle. In the midst of China's hunt for energy, the Uyghurists and Xinjiang province play a strategic meaning for the future of China. The country's dependence on oil prompts Beijing to change its assimilationist strategy toward this province. Hence by no means the Uyghurs' demand calmed.

Key words: *Uyghurs, Xinjiang, China's policy, identity, natural resources, geography*

Wilayah Otonom Xinjiang Uyghur, juga disebut Xin (untuk kependekannya), terletak di Cina utara-barat laut dan sudah menjadi provinsi otonom semenjak tahun 1955, dengan nama resmi Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR), beribukota Urumqi. Terletak di pedalaman benua Eurasia, Xinjiang berbatasan dengan Rusia, Kazakhstan, Kirghizistan, Tajikistan, Pakistan, India, Afghanistan, Mongolia, dan Tibet. Posisi geografis membuat Xinjiang memiliki arti strategis yang sangat penting bagi Cina maupun negara-negara di sekitarnya. Dalam sejarah, Xinjiang merupakan bagian pengendali kunci dari *Silk Road*, sementara saat ini merupakan bagian tak terpisahkan dari kereta api yang mengarah ke Continental Eurasia kedua. Dengan demikian wilayah Xinjiang adalah “rumah” dari berbagai keturunan peradaban Turki seperti Kazaks Uighur, Kirgiz, Tatar dan Uzbek. Uyghur sendiri merupakan suku terbanyak jumlah populasinya di antara kelompok etnis di Xinjiang berdasarkan keturunan Turki yang memiliki banyak bahasa. Karena letaknya di Jalan Sutra yang terkenal, Uyghur memainkan peran penting dalam pertukaran budaya antara Timur dan Barat, sehingga mereka memiliki budaya dan peradaban yang unik.

Invasi Cina ke wilayah Turkestan Timur (sebutan untuk wilayah kedaulatan Uyghur Xinjiang) telah terjadi berkali-kali, yaitu pada 104 SM, 59 SM, 73, dan 448, 657 dan 744 tidak lain disebabkan karena Cina hendak menguasai *Silk Road* (Alptekin, 2008). Pada 1884, Xinjiang dimasukkan ke dalam wilayah

kedaulatan Cina oleh Dinasti Qing. Upaya terakhir Cina menduduki Xinjiang terjadi pada 1949 ketika Partai Komunis Cina mengambil alih kekuasaan dari para nasionalis. Pada 1955, Xinjiang menjadi wilayah otonom di bawah RRC, setelah sebelumnya diintegrasikan melalui tindakan “*Peaceful Liberation*” oleh Pemerintah Komunis Cina. Tindakan ini merupakan antitesis bagi janji Cina untuk memberikan hak penentuan nasib sendiri (*right to self-determination*) yang telah dijanjikan sejak lama bagi Xinjiang. Aneksasi Cina menimbulkan reaksi negatif bagi rakyat Turkestan Timur dan selama lebih dari seratus tahun Pemerintah Cina tidak mampu benar-benar menguasai Xinjiang.

Provinsi Xinjiang dihuni oleh bangsa Uyghur yang beragama Islam, berbahasa Turki namun merupakan etnis minoritas. Sejak komunis mengambil alih daerah tersebut pada 1949, kaum Uyghur telah mengalami penganiayaan agama dan budaya oleh orang Cina Han. Setelah ditemukannya minyak dan sumber daya alam lainnya di wilayah tersebut, Cina Han membanjiri Xinjiang dalam upaya untuk mengeksploitasi sumber daya. Sebenarnya masuknya bangsa Han telah menguatkan kembali hubungan yang sudah lemah antara Cina Han dan Uyghur akibat perbedaan agama, budaya, dan sosial. Namun, masuknya kaum Han ke Provinsi Xinjiang telah menyebabkan Uyghur merasa tersisih dengan perilaku represif kaum Han yang didukung oleh Pemerintah Cina. Hal ini menjadikan kaum Uyghur memperkuat identitasnya sehingga melahirkan

¹ Korespondensi: Baiq L.S.W. Wardhani, Departemen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Airlangga, Jalan Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia. Telepon (031) 5034015. E-mail: baiq.wardhani@gmail.com

tindakan ekstrem, yaitu menuntut kemerdekaan dan mendirikan negara terpisah. Salah satu faktor yang memperkuat keinginan mereka untuk memisahkan diri adalah karena kaum Uyghur merasa bahwa Xinjiang bukanlah merupakan bagian dari negara Republik Rakyat Cina. Tidak diakuiinya kedaulatan Cina oleh kaum Uyghur menyebabkan Pemerintah Cina memiliki legitimasi lemah di kawasan ini. Krisis Urumqi tahun 2009 menandai kegagalan Pemerintah Cina dalam menangani masalah etnis dan tuntutan pemisahan diri di wilayah Xinjiang. Hal ini menandai pentingnya masalah nasionalitas (*minzu wenti*) bagi Pemerintah RRC.

Sejak awal, kaum Uyghur di Xinjiang tidak pernah mengakui diri mereka sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Cina. Keyakinan mereka yang menolak menjadi bagian dari RRC adalah karena secara historis bangsa Uyghur di Xinjiang adalah keturunan Turki dan merupakan bagian dari Republik Turkestan Timur, wilayah yang kemudian dianeksasi oleh Cina. Wang Enmao, sekretaris pertama Eastern Turkestan Party Committee menyatakan bahwa tindakan Cina menganeksasi wilayah Xinjiang merupakan hal yang tidak dapat diterima. Wang menyatakan, "...China has been a united state since ancient times. How could it go backwards to a federal system to establish a union of republics?" (Alptekin 2008).

Pemberontakan bersenjata yang terjadi di Baren pada April 1990 menandai peningkatan kekerasan Muslim Uyghur di Xinjiang. Retorika etnis dan agama menjadi pembenaran tindakan mereka. Kekerasan sikap Uyghur menandai kerasnya perjuangan mereka untuk meninggalkan Cina karena Pemerintah Cina yang didominasi oleh kaum Han melakukan represi militer dan budaya. Bahkan setelah peristiwa Baren, Beijing semakin mengekang kebebasan beragama dan menghembuskan isu revivalisme Islam dan bangkitnya nasionalisme etnis. Perkembangan ini semakin memperkuat diskriminasi kepada kaum Uyghur. Sikap diskriminatif terhadap kaum Uyghur yang ditunjukkan oleh Pemerintah Cina sudah sedemikian dalam, tidak hanya pada kebebasan mengekspresikan spiritualitas beragama, namun diskriminasi juga ditunjukkan dalam hal kesehatan, pendidikan dan pekerjaan, sehingga bangsa Uyghur merasa betul-betul tidak nyaman menjadi "bagian tak terpisahkan" dari RRC.

Singkat kata, upaya artifisial untuk asimilasi yang dilakukan oleh Pemerintah Cina bagi kaum minoritas Uyghur dengan kaum mayoritas Han belum berhasil, bahkan terancam gagal dengan sikap menentang dari kaum minoritas. Untuk mencapai tujuan pemisahan diri, kaum Uyghur membentuk organisasi-

organisasi pembebasan, seperti Eastern Turkestan People's Party (ETPP) East Turkestan Liberation Organization (Sharqiy Turkestan Azatliq Teshkilati; disingkat ETLO), dan East Turkestan Islamic Movement (ETIM). Pemerintah Cina menganggap gerakan ETIM sebagai '*gravest terrorist threat*' dan mengancam integritas teritorial Cina dan Pemerintah Cina tetap memandang bahwa pertikaian Uyghur-Han merupakan pangkal persoalan besar yang mengganggu stabilitas Cina (Singh 2010).

Secara kultural, Uyghur lebih banyak dipengaruhi oleh peradaban di perbatasan Cina Barat, seperti Kazakhstan, Tajikistan, Kirghiziastan, Pakistan dan wilayah-wilayah yang didominasi oleh peradaban Islam. Perbedaan kultural menyebabkan sulitnya kaum Uyghur beradaptasi dengan kaum Han, bahkan mencemaskan terhapusnya *cultural survival* mereka. Kekhawatiran kaum Uyghur akan hilangnya identitas kultural berhubung masifnya kebijakan asimilasionis Cina, menyebabkan gerakan-gerakan pembebasan East Turkestan mengeraskan sikap penolakan mereka untuk bergabung dengan Cina. Represi kaum Han terhadap Uyghur yang telah terjadi selama berpuluh-puluh tahun menandai semakin sulitnya dua kelompok etnis tersebut untuk hidup berdampingan secara damai. Harapan bangsa Uyghur yang berada di sekitar Xinjiang untuk memperkuat identitas pan-Uyghurisme (seperti yang pernah disampaikan oleh World Uyghur Congress, misalnya), menjadi salah satu elemen penting dari gerakan nasionalis Uyghur di Xinjiang. Bagi Pemerintah Cina, membiarkan kaum Uyghur melepaskan diri akan berdampak pada menguatnya gerakan-gerakan nasionalis lainnya yang bertujuan melawan Pemerintah Cina, seperti Tibet, Mongolia dan Taiwan.

Seiring dengan represi tersebut, terdapat beberapa faktor yang menjadikan konflik di Xinjiang menarik perhatian internasional. Salah satu yang terpenting adalah faktor minyak. Faktor ini berkontribusi terhadap penindasan kemajuan ekonomi di kawasan itu. Faktor minyak memberi signifikansi atas aspek lingkungan dari perjuangan antara Uyghur melawan kaum Han. Datangnya kaum Han ke Provinsi Xinjiang pada 1949 sebagian besar disebabkan karena dibangunnya Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) atau Xinjiang Shengchan Jianche Bingtuan (<http://chinaperspectives.revues.org/648>, 5 November 2010). Xinjiang merupakan ladang minyak yang sangat penting bagi Cina, terutama pada saat Cina sedang mencapai status negara industri maju. Krisis energi global mengharuskan Cina memberi perhatian khusus pada Xinjiang yang mampu membuat Cina menjadi negara besar

dan diperhitungkan di persaingan global. Didasari oleh arti strategis Xinjiang bagi Cina dan dunia internasional, setiap keinginan Xinjiang untuk membangun hubungan dengan dunia luar membuat Cina merasa terancam karena membaiknya hubungan komunikasi dan transportasi Xinjiang dengan dunia luar akan melemahkan kebijakan integrasi Cina atas kaum Uygur. Ditemukannya cadangan besar sumber daya alam strategis di Xinjiang, khususnya minyak dan gas alam, telah menghasilkan ketegangan dan menjadikan pemisahan diri Xinjiang semakin kompleks. Dengan demikian, secara bersamaan faktor minyak dan lokasi geografis Xinjiang memberi makna tertentu pada jenis konflik yang terjadi di wilayah ini karena konflik tersebut memiliki dimensi internasional yang penting.

Masalah Xinjiang dapat menggerakkan negara-negara di sekitar Cina dan negara-negara yang berkepentingan atas masalah energi tertelan dalam pusaran kerja sama dan konflik dengan kepentingan yang tumpang tindih. Amerika Serikat, misalnya, selain berkepentingan atas masalah energi, gerakan pemisahan diri di Xinjiang menimbulkan kecurigaan atas munculnya terorisme di Cina dengan ditemukannya bukti-bukti hubungan Al-Qaeda dengan ETIM (Raman 2002). Rusia, negara yang berbatasan darat dengan Xinjiang, memiliki hubungan ekonomi-perdagangan dengan provinsi tersebut. Pada masa lalu, Uni Soviet pernah melakukan invasi militer ke Xinjiang, dan kini Rusia bekerja sama dengan Pemerintah Cina dalam eksplorasi minyak, gas dan kerja sama lain dalam kerangka Shanghai Cooperation Organization. Organisasi ini betul-betul menempatkan Xinjiang pada posisi kunci bagi keberlangsungan kerja sama antara Cina dengan negara-negara sekitarnya, bahkan Eropa. “[x]injiang is the important bridge and channels connecting China with the Central Asia, West Asia, South Asia and East and West Europe” (Yuxin 2008).

Melihat arti strategis Xinjiang, Pemerintah Cina tidak segan-segan melakukan berbagai upaya agar dapat menegakkan kedaulatannya di provinsi tersebut, terutama setelah kerusuhan di Urumqi pada 2009. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan ‘memanjakan’ Xinjiang dengan investasi. Pemerintah Cina berupaya mengurangi disparitas ekonomi dengan menargetkan naiknya *gross domestic product* sampai ke rata-rata tingkat nasional pada 2015. Janji yang disampaikan oleh Presiden Hu Jintao tersebut termasuk meliputi pembangunan jalan raya, rel kereta api, dan aset-aset tak bergerak lain yang bertujuan memperbaiki infrastruktur, kapasitas pengembangan wilayah, persatuan etnis,

dan stabilitas sosial. Jumlah investasi Pemerintah Cina di provinsi tersebut tercatat sebanyak dua trilyun yuan (Prakash 2010). Namun, tingginya tingkat investasi ternyata belum mampu menjadikan Xinjiang sebagai wilayah harmonis, stabil dan integratif. Hal ini terbukti dengan terjadinya beberapa kerusuhan (kerusuhan terakhir terjadi pada Juli 2009) dan menguatnya gerakan pan-Uyghuris yang mengindikasikan munculnya revivalisme Islam di Asia Tengah. Hal tersebut merupakan penanda betapa sulitnya Pemerintah Cina dalam menegakkan kedaulatan di Xinjiang. Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam tulisan ini diulas arti strategis Xinjiang bagi Cina serta respons Beijing dalam meredam tuntutan kemerdekaan Uyghur di Xinjiang dan mencegah berkembangnya gerakan Pan-Uyghuris di Xinjiang.

Rekonstruksi Identitas Uyghur dan Tuntunan Kemerdekaan

Seperti telah diuraikan sebelumnya, Xinjiang sebagai sebuah wilayah dan Uyghur sebagai sebuah bangsa, memiliki arti strategis bagi Cina. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang melekat dalam Xinjiang dan Uyghur, baik faktor *endogeneous* maupun *exogeneous*. Faktor *endogenous* yang dimaksudkan di sini adalah yang melekat dalam diri Uyghur, terutama variabel identitas. Sedangkan faktor *exogenous* merupakan variabel yang berasal dari ‘luar’ Uyghur, seperti sumber daya alam dan posisi geografis. Baik faktor *endogenous* maupun *exogeneous* merupakan dua hal yang sama-sama memiliki signifikansi, yang menyebabkan Xinjiang dan Uyghur mendorong perilaku domestik dan luar negeri Cina. Karena faktor-faktor tersebut menentukan masa depan Cina, wilayah Xinjiang dan kaum Uyghur mendapat prioritas tinggi dari Beijing.

Untuk menjelaskan mengapa Uyghur penting bagi Beijing, penting untuk dipahami mengenai siapakah Uyghur tersebut. Secara sederhana, Uyghur adalah proyek asimilasionis Pemerintah Cina. Menurut Uyghur American Association (UAA), nama resmi tanah air mereka adalah East Turkistan atau Xinjiang Uyghur Autonomous Region of China. Kerajaan Islam Uyghur Turkistan Timur adalah wilayah merdeka sampai dengan Dinasti Manchu pada 1876. Setelah kaum nasionalis Cina mengalahkan kaisar Manchu, maka Turkistan Timur diambil alih oleh pemerintahan nasionalis Cina pada 1911 (<http://www.uyghuramerican.org/categories/About-Uyghurs/>). Uyghur adalah salah satu minoritas muslim yang diakui oleh Pemerintah RRC, selain Hui, Kazakh,

Dongxiang, Kyrgyz, Salar, Tajik, Uzbek, Baonan, and Tatar (<http://factsanddetails.com/china.php?itemid=170&catid=5&subcatid=88>; Bhattacharya 2003: 358). Mereka tinggal di wilayah-wilayah seperti Kansu, Ningsia, Tsinghai, Shensi, Suiyuan, Hopei, and Honan.

Letak Xinjiang yang berada di antara peradaban-peradaban besar Islam serta kaya minyak dan batu bara telah menjadikan wilayah ini sangat strategis. Penduduk Xinjiang didominasi oleh bangsa Uyghur yang merupakan bagian/keturunan Turki. Jumlah suku Uyghur adalah etnis terbesar di Xinjiang, mencapai 46 persen dari total 19 juta jiwa penduduknya. Suku Uyghur mulai memeluk Islam Sunni sejak abad ke-10. Islam kian mendapatkan popularitas di tengah kerasnya sikap pemerintahan komunis selama beberapa dekade terakhir. Di Xinjiang terdapat 24.000 masjid dan 29.000 ulama. Kawasan muslim paling agamis terdapat di kota-kota Jalur Sutra lama di selatan seperti Kashgar, Yarkand, dan Khotan.

Mengutip pernyataan Conway (2010), sekalipun sering digambarkan sebagai minoritas muslim Cina, Islam yang dianut bangsa Uyghur tidaklah monolit, dan tidak semua naratif maupun identitas tentang nasionalisme Uyghur berkaitan dengan Islam. Identitas etno-religius ‘Uyghur’ sebenarnya merupakan identitas yang dikonstruksikan oleh Pemerintah Cina pada abad ke-20. Identitas ini dapat dikatakan artifisial dan menyesatkan serta menjadi perdebatan di kalangan kaum Uyghur sendiri dengan Pemerintah Cina. Dengan kata lain, *ethnonym* ‘Uyghur’ tidak lain merupakan kata dan identitas yang diproduksi oleh Pemerintah Cina, seolah-olah kata ‘Uyghur’ merupakan *ethnogenesis* yang disandang oleh kaum di Xinjiang. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Cina demi kepentingan narasi sejarah pemerintah, sementara hampir tidak ada yang meluruskan hal tersebut, seolah-olah *ethnonym* ‘Uyghur’ merupakan sebuah realitas empiris. Menurut Conway (2010: 1–2):

Although the standard narrative of Uyghur nationality propagated by CCP and Uyghur voices alike characterizes the Uyghur as the indigenous people of Xinjiang, there is evidence to suggest that this ethnonym originated only in the geo-political machinations of the twentieth century. The case of the Uyghur illustrates that minority ethno-religious identities are the products of a multi-layered discourse, rather than any perceived primordial allegiances...the notion of the ‘Uyghur’ is a product of China’s nationality policy and little else.

Kata ‘Uyghur’ sesungguhnya merupakan rekonstruksi Pemerintah Cina setelah para penasihat Uni Soviet mengusulkan pemakaian nama itu pada 1931. Nama tersebut digunakan kembali, setelah lebih dari 500 tahun tidak pernah disebut-sebut lagi karena pemilik nama ‘Uyghur’, suku beragama Budha di Xinjiang telah beralih menjadi Muslim. Menghidupkan kembali penyebutan Uyghur untuk masyarakat yang berdiam di sekitar Oasis itu tidak lain karena Pemerintah Cina merekonstruksi identitas Uyghur agar seolah-olah nampak merupakan bagian tak terpisahkan dari Cina sejak awal (Battacharya 2003: 358). Dengan demikian, Uyghur lebih merupakan produk diskursus hasil dari sebuah proses, daripada sebutan ‘primordial’. Beberapa kalangan terpelajar (misalnya Justin Jon Rudelson, Dru C. Gladney, James Millward, Gardner Bovingdon and Ildiko Beller-Hann), mencoba menganalisis konstruksi *ethnonym* tersebut.

Masa jeda perang (*interwar*) tahun 1911–1939 ditandai dengan keinginan Uni Soviet dan Guomintang (GMD) untuk menguasai Xinjiang karena faktor sumber daya alam dan letak strategisnya. Keberhasilan kaum Uyghur membentuk negara Turkic-Islamic Republic of Eastern Turkestan (TIRET) menjadi penanda keberhasilan mencapai kemerdekaan walau dalam jangka waktu yang tidak lama. Hadirnya beberapa kekuatan di Xinjiang berpengaruh pada ketidakstabilan Xinjiang dengan bermacam-macam pertentangan antara kelompok-kelompok GMD, Uni Soviet, Kazakhs, Uyghur dan Partai Komunis Cina (PKC).

Seperti telah dinyatakan sebelumnya, kaum Uyghur telah lama berjuang untuk melepaskan diri dari kekuasaan Pemerintah Cina. Sebagai sebuah wilayah yang terletak sangat strategis, Xinjiang sebenarnya merupakan area yang sangat luas, dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak, menyebabkan wilayah ini menjadi tempat untuk pengujian nuklir, pelatihan militer, dan penjara para buruh yang membangkang. Populasi Xinjiang yang berjumlah 18 juta mencakup beberapa kelompok yang berbahasa etnis Turki-Muslim, penduduk Uyghur yang berjumlah delapan juta, adalah etnis dengan penduduk terbesar. Persentase etnis Han di Xinjiang telah tumbuh pesat akibat kebijakan Pemerintah Cina yang dengan sengaja memperbesar jumlah populasi Han agar menjadi mayoritas di Xinjiang. Sama seperti Tibet, Uyghur di Xinjiang telah berjuang untuk keberadaan budaya mereka di tengah-tengah represi pemerintah Cina yang didukung oleh para migran Cina dari etnis yang lain. Selain itu Uyghur juga bertahan dari represi politik

dalam bentuk apa pun yang disebabkan karena perbedaan identitas. Demi menghilangkan dominasi Uygur di Xinjiang, Pemerintah Cina tidak segan-segan melakukan penganiayaan, pemenjaraan dan penghilangan. Masjid-masjid ditutup dan bahasa Uygur dilarang digunakan di perguruan tinggi. Rakyat Uygur dikenakan wajib kerja tidak dibayar dalam pembangunan jaringan pipa yang direncanakan untuk mengeksplor sumber daya minyak bumi lokal ke bagian lain dari Cina.

Masifnya pertentangan antara Pemerintah Cina dengan rakyat Uygur digambarkan oleh Uygur American Association sebagai berikut:

Heavy-handed state repression of all activities associated by the Chinese government with "Separatism" has created a dire human rights environment for the Uygur Muslim minority population of northwest China. Beijing has for more than a decade claimed to be confronted with "religious extremist forces" and "violent terrorists" in Xinjiang Province, a vast region one-sixth of China's land area. (<http://www.uyghuramerican.org/categories/About-Uyghurs/>).

Nasionalisme etnis di kalangan Uygur dibentuk tidak hanya karena faktor identitas etnis Turki semata-mata, tetapi telah diperkuat dalam kontestasi identitas negara Cina. Seperti halnya Tibet, Xinjiang merupakan etnis-etnis minoritas yang berjuang untuk identitas dan penentuan nasib sendiri. Namun, berbeda dengan Tibet, isu etnisitas Xinjiang lebih rumit karena terkait dengan isu-isu lainnya seperti identitas Islam di Tengah dan Asia Barat. Faktor Islam yang bercampur dengan faktor kesadaran etnis secara bersamaan telah menghasilkan sebuah konflik bernuansa etnoreligius yang kompleks di Xinjiang.

Masalah ini diperburuk pascaperistiwa 9/11 yang menandai perang melawan terorisme internasional yang membawa pengaruh di wilayah Xinjiang yang menyebabkan Pemerintah Cina mengaburkan perbedaan antara separatisme dan terorisme. Kontestasi etnis Uygur-Han menyebabkan Beijing menganggap Xinjiang sebagai ancaman keamanan bagi negara Cina. Negara Cina, yang bertujuan mencapai persatuan nasional dan keamanan, mencoba untuk mengaburkan identitas Uygur di Cina dalam rangka pembentukan nasionalitas kebangsaan Cina. Nama Xinjiang yang berarti "*New Frontier*" atau "*New Territory*" sebenarnya mampu menjelaskan keinginan mereka untuk berpisah dari Cina karena Xinjiang tidak pernah menjadi bagian dari negara Cina, tidak seperti yang selama ini selalu dinyatakan oleh Cina (Bhattacharya 2003).

Identitas keislaman dan etnisitas yang kuat, yang dibuktikan oleh berbagai kebiasaan beragama dan gaya hidup serta tradisi di kalangan kaum Uygur memberi isyarat yang sangat kuat kepada Cina untuk tuntutan pemisahan diri yang sangat kuat. Semakin kuat tekanan Cina pada tuntutan merdeka, terutama dengan tindakan-tindakan kekerasan, semakin memperkuat identitas ke-Uygur-an mereka. Bahkan, lebih menarik lagi, sejak awal abad ke-19 terdapat gejala menguatnya identitas ke-Turki-an di antara sesama keturunan Turki di sekitar wilayah Xinjiang. Menurut Bhattacharya (2003: 361-362):

In the 19th century under the influence of Pan-Turkism, the Xinjiang region adopted the Pan-Turkic ideal to unite all the people of Turkish origin. Uygur was regarded as one of the branches of the Turkic tree. Thus, the words Turkic and Uygur were used inter-changeably. According to contemporary Uygur intellectuals, the idea of Uygur nationalism or Turk nationalism was born soon after the Manchu conquest of East Turkistan in 1759... The Uygur ideology of ending the Chinese colonial rule and establishing an independent country of East Turkistan defined the concept of Uygur nationalism.

Semakin menguatnya identitas Uygur di Xinjiang dan sekitarnya menimbulkan ancaman baru bagi Beijing. Cina bersedia mengambil berbagai tindakan yang dilakukan untuk mencegah berkembang luasnya sentimen nasionalisme etnis di negaranya. Satu hal yang menarik, di tengah kuatnya tekanan Beijing untuk berkembangnya identitas Uygur dan upaya Beijing untuk mengasimilasikan Uygur dengan suku dominan, bangsa Uygur tidak sepi dari perjuangan revivalisme identitas dan nasionalisme etnis. Kaum Uygur, terutama mereka yang tinggal di luar Xinjiang merupakan para pelaku dekonstruksi identitas yang dilakukan oleh Beijing. Baranovitch (2003) menentang pandangan banyak pihak yang menyatakan bahwa perjuangan Uygur sepi dan tak berdaya dalam menghadapi tekanan Beijing. Para Uyguris yang telah meninggalkan Xinjiang ke bagian lain dari Cina memegang peranan penting bagi penegasan identitas ke-Uygur-an mereka. Menurut Baranovitch (2003: 728): "Uyghurs in Beijing have been able to achieve an independent public voice that often challenges their orthodox representation in nationally distributed culture and media, a voice that extends not only beyond Xinjiang but also beyond China."

Bangsa Uygur yang telah bermigrasi ke kota-kota besar di China merupakan agen penting yang

menegaskan bahwa identitas etnis adalah proses yang dapat dinegosiasikan, dan etnik minoritas adalah pelaku aktif dalam proses tersebut. Upaya Beijing untuk mempererat persahabatan dan kerja sama dengan negara-negara di sekitar Xinjiang merupakan langkah strategis Beijing untuk menangkalkan dukungan negara-negara tersebut bagi kemerdekaan etnis Uyghur di Xinjiang. Beijing menyadari bahwa pertalian etnis antara rakyat Xinjiang dengan rakyat beretnis sama yang tinggal di sekitar Xinjiang dapat membuahkan ancaman bagi integritas teritorial RRC.

Faktor Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah variabel *exogenous* yang mendorong Cina bersungguh-sungguh ingin mengontrol Xinjiang. Cina adalah negara yang tengah berbenah diri untuk mencapai status negara maju. Setelah tidak lagi mengandalkan batu bara sebagai sumber energi utama yang menggerakkan mesin-mesin produksinya, atas bantuan Uni Soviet, RRC mulai beralih ke minyak. Pembukaan ladang-ladang minyak di berbagai tempat seperti Shenli (1962), Daqing (1963) dan Dagang (1967), menandai era Cina yang mandiri dalam hal pemenuhan kebutuhan minyak. Produksi minyak Cina terus meningkat seiring dengan laju pesat industrialisasinya.

Pemerintah Cina menyadari bahwa negaranya saat ini sedang mengalami krisis energi. Perdebatan mengenai keamanan energi mendapat perhatian sangat luas di berbagai kalangan, di antaranya adalah perusahaan-perusahaan minyak milik negara dan Komisi Perencanaan Pembangunan Negara (*State Development Planning Commission* - SDPC), Komisi Ekonomi dan Perdagangan Negara (*State Economic and Trade Commission* - SETC), Kementerian Luar Negeri (*Ministry of Foreign Affairs* - MFA) dan kaum militer, lembaga-lembaga penelitian ekonomi dan luar negeri, akademisi, dan media. Besarnya perhatian yang diberikan oleh lembaga-lembaga tersebut menandakan bahwa masalah keamanan energi telah berkembang menjadi masalah nasional yang berpengaruh pada keamanan. Para analis menyatakan bahwa sumber ketidakamanan energi Cina adalah kerawanan harga dan gangguan fisik atas pasokan minyak. Keprihatinan utama terletak pada dampak negatif fluktuasi harga minyak yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial. Berdasarkan berbagai pengamatan, pada umumnya mereka menyimpulkan bahwa jalan keluar dari kerawanan energi adalah dengan mengimpor pipa darat dan menjalin hubungan baik dengan negara-

negara kaya minyak melalui diplomasi energi (Downs 2004: 28).

Diplomasi energi yang dilakukan Cina terbukti efektif dengan keberhasilan Cina menggeser Amerika sebagai mitra dagang utama Australia, salah satu sekutu penting AS di Asia-Pasifik. Mulai 2006, Australia mengeksport gas alam cair (*liquid natural gas*-LNG) ke Cina sebanyak \$1 miliar dolar AS selama jangka waktu 25 tahun. Cina juga berhasil merebut simpati Kanada dengan rencana dibangunnya pipa senilai 2 miliar dolar yang digunakan untuk menyalurkan minyak dari Kanada menuju Cina (Zweig & Bi 2005: 30). Kebutuhan energi bagi Cina sangat vital demi keberlangsungan pemerintah komunis itu sendiri. Karena pemerintahan Cina bersifat terpusat, pertumbuhan ekonomi memegang peranan penting, dan politik luar negerinya disesuaikan dengan kebutuhan domestik, termasuk memberi kesempatan pada para pelaku bisnis untuk menentukan arah dan bentuk politik luar negeri. Selain itu, dalam rangka menjamin keamanan energinya, Beijing menjalin kedekatan hubungan dengan berbagai negara maju (untuk keperluan investasi dan teknologi) dan negara berkembang (sebagai pemasok minyak).

Salah satu cara untuk mengamankan pasokan energinya, Cina menjalin hubungan erat dengan negara maju (untuk investasi dan teknologi) dan negara berkembang yang memiliki sumber-sumber energi yang diperlukan Cina. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya pula, Cina menjalin hubungan diplomatik dan dagang dengan negara-negara pengeksport minyak dari wilayah Timur Tengah (Saudi Arabia, Oman, Iran), Afrika (Angola, Sudan, Kongo), Eropa dan wilayah Barat Rusia, Norwegia, Brazilia serta Asia-Pasifik (Indonesia, Malaysia, Vietnam). Selain menjalin kedekatan dengan negara-negara tersebut, Cina juga bekerja sama dengan rezim-rezim yang dianggap AS sebagai rezim pariah seperti Sudan, Iran, Venezuela. Hal ini memprihatinkan AS karena keputusan Cina menjalin hubungan bisnis dengan negara-negara pariah tidak akan membantu AS untuk menegakkan demokrasi di negara-negara tersebut.

Faktor Geografi

Geografi merupakan pertimbangan penting bagi Cina untuk mempertahankan Xinjiang. Letak Xinjiang yang sangat strategis menyebabkan wilayah ini menjadi taruhan Beijing dalam kepentingan nasionalnya karena secara geografis, kultural, maupun etnis, Xinjiang adalah bagian dari Asian Tengah.

Oleh karenanya, Beijing akan melakukan berbagai strategi untuk memenangkan kepentingannya di Xinjiang, baik melalui kerja sama bilateral maupun multilateral, cara-cara kekerasan maupun persuasif untuk membendung berbagai perilaku sentrifugal yang mengancam stabilitas dan kepentingan Beijing.

Xinjiang yang telah lama menjadi taruhan bagi “permainan besar” negara-negara penting di masa lalu, letak geografisnya pada masa kini tetap menjadikan Xinjiang selalu menjadi pusat perhatian. Saat ini Xinjiang dan sekitarnya menjadi wilayah sensitif karena beberapa isu, di antaranya isu konflik India-Pakistan, isu nuklir India, situasi di Afghanistan yang masih berkecamuk, situasi rawan di Lembah Ferghana antara Tajikistan, Kyrgyztan, dan Uzbekistan, dan terutama setelah ditemukannya sumber minyak di Tarim Basin, Xinjiang, yang memberi harapan baru bagi Beijing untuk memperkuat perekonomiannya. Xinjiang yang secara darat berbatasan dengan negara-negara Asian Tengah, sebuah kawasan yang kaya sumber alam, namun sebelumnya diabaikan dan hanya menempati posisi pinggiran dalam pusaran strategis negara-negara besar. Namun, semenjak ditemukannya deposit mineral dan gas di Laut Kaspia, perhatian dunia tertuju ke kawasan ini. Menurut Klare (2001: 49):

Central Asia had once been viewed as a peripheral concern, a remote edge of the Pacific Command's main areas of responsibility (China, Japan, and the Korean Peninsula). But the region, which stretches from the Ural Mountains to China's western border, has now become a major strategic prize, because of the vast reserves of oil and natural gas thought to lie under and around the Caspian Sea.

Beralihnya perhatian dunia ke Asia Tengah secara potensial menjadikan kawasan ini sebagai ajang konflik baru. Asia Tengah saat ini telah menjadi sebuah kawasan yang menjadi titik penting bagi Amerika Serikat, sehingga Washington mengubah pemikiran strategisnya (*strategic thinking*), yang membuat Asian Tengah tidak hanya sekadar kawasan masa lalu (sehubungan dengan konflik ideologinya dengan Uni Soviet), namun kawasan masa depan yang sangat menjanjikan. Asia Tengah telah menjadi *the new geography of conflict*, yang mampu menggerakkan armada-armada AS bergerak menuju kawasan ini untuk mengamankan jalur-jalur penting pemasok kebutuhan energi AS.

Xinjiang berbatasan langsung dengan negara-negara Asia Tengah penghasil sumber daya alam yang besar, namun merupakan negara-negara yang tidak

stabil dan rawan konflik. Tidak saja Cina menaruh perhatian khusus pada Asia Tengah, perhatian AS menjadi lebih besar lagi di kawasan ini sejak pasca-Perang Dingin. Departemen Energi AS memprediksi, konsumsi global minyak diperkirakan meningkat dari 77 juta barel per hari di tahun 2000 menjadi 110 juta di tahun 2020, yang berarti kenaikan sebanyak 43 persen. Jika perkiraan ini akurat, dunia memerlukan sekitar 670 juta sampai dengan tahun 2020, atau sekitar dua pertiga cadangan minyak dunia (Klare 2001: 56). Oleh karena itu AS harus memastikan bahwa pasokan energinya tidak terganggu oleh ketidakstabilan yang berlangsung di sana. Pasokan energi dari Laut Kaspia, misalnya, harus melewati Armenia, Azerbaijan dan Georgia sebelum mencapai Amerika. Sama dengan AS, Cina pun secara lebih waspada mengawasi Asia Tengah.

Sebagai salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Asia Tengah, Cina melihat signifikansi yang lebih tinggi pada Asia Tengah dengan mengalihkan kekuatan militernya dari utara (perbatasan dengan Rusia) ke barat (wilayah Xinjiang). Keruntuhan Uni Soviet pada 1991 memberi kesempatan Cina untuk lebih berperan dalam mengontrol perkembangan di Asia Tengah. Cina juga memprihatinkan wilayah-wilayah potensial pemasok energinya, selain Asia Tengah, terletak di wilayah titik api (*flashpoint*) dengan tumpang tindihnya klaim kepemilikan pulau-pulau di Laut Cina Selatan, yang Cina sendiri menjadi salah satu negara yang merasa berhak melindungi kepentingannya dengan menempatkan pasukan di Laut Cina Selatan. Salah satu faktor yang masih menjadi kendala impor minyak bagi Cina adalah belum dimilikinya pipa lintas negara (*cross border pipelines*) sehingga Cina masih sangat tergantung pada jalur laut untuk mengapalkan minyaknya dari Afrika dan Timur Tengah, terutama kapal-kapal yang melalui Selat Malaka, Selat Taiwan, Samudra Hindia dan beberapa *chokepoints* penting lain (Zweig & Bi 2005).

Ketergantungan Cina pada jalur-jalur pelayaran ini memegang peranan vital, karena jika jalur-jalur ini dikuasai oleh kekuatan tidak bersahabat, maka dapat dipastikan Cina akan mengalami krisis energi. Kekhawatiran Cina semakin besar jika jalur-jalur laut ini suatu ketika dikuasai oleh para teroris. Jika terjadi gangguan, Cina tidak segan-segan menjalankan strategi militer untuk mengamankan jalur-jalur tersebut. Selain itu, Cina juga mengkhawatirkan terjadinya tabrakan kepentingan dengan AS dalam masalah energi di Asia Tengah. Sebagai negara hegemon, AS memerlukan ‘ruang’ yang tidak boleh

diganggu oleh siapa pun. Di lain pihak, Cina yang tumbuh kian besar dapat menjadi faktor pengganggu bagi hegemoni AS. Terkait masalah energi, Cina yang bergantung pada ekspor energi, mulai membangun rasa ketidakamanan jika berhadapan dengan AS, dan mengkhawatirkan tindakan blokade AS. Mengenai hal ini, David Zweig dan Bi Jianhai (2005: 27) mengungkapkan:

Although China's new energy demands need not be a source of serious conflict with the West in the long term, at the moment, Beijing and Washington feel especially uneasy about the situation... Washington might resort to economic tactics to contain China. Given the White House's current penchant for unilateral intervention and the loud voices in Congress calling China a military threat, Beijing might reasonably begin to fear that the United States will try to block its purchases of natural resources to destabilize it. Washington must be mindful of these worries and not exacerbate them needlessly.

AS dan Cina pada dasarnya memiliki kepentingan yang sama dalam hal energi, yaitu dalam hal harga minyak yang terjangkau, keamanan jalur-jalur laut dan lingkungan internasional yang stabil. Kesamaan kepentingan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kemakmuran ekonomi mereka dan manfaatnya bagi kepentingan dunia yang lebih luas.

Respons Pemerintah Cina

Keruntuhan imperium Uni Soviet pada awal 1990-an yang melahirkan banyak negara baru, tidak saja mengubah peta dunia, namun juga memberi dampak besar, tantangan dan harapan bagi Cina. Sebagai negara paling luas wilayahnya di Asia, berpenduduk paling banyak, Cina memiliki keberagaman etnis yang bervariasi. Disintegrasi Uni Soviet membuahke kekhawatiran bagi Cina dan negara-negara yang memiliki karakteristik serupa dengan Cina. Sejak merdekanya beberapa negara di kawasan Asia Tengah, seperti Uzbekistan (September 1991), Kyrgyzstan (September 1991), Tajikistan (September 1991), Turkmenistan (Oktober 1991), dan Kazakhstan (Desember 1991) sebagai akibat bubarnya Uni Soviet, cengkeraman Cina terhadap Xinjiang kian kuat, karena kekhawatiran atas "efek domino" yang boleh jadi juga melanda wilayah ini. Kemerdekaan negara-negara baru Uni Soviet yang diikuti oleh republik-republik baru di Yugoslavia adalah *mirror image* yang ditakutkan oleh Cina, apalagi negara-negara baru itu berbatasan darat langsung dengan Xinjiang, provinsi otonom paling

rebellious di Cina. Kekhawatiran Cina tentang virus disintegrasi menyebabkan Cina mengambil tindakan-tindakan yang dapat meredam keinginan pemisahan diri Uyghur sekaligus berkembangnya sentimen Uyghuris di sekitar Xinjiang.

Seperti telah dinyatakan sebelumnya, Xinjiang adalah proyek asimilasi Pemerintah Cina dalam upaya mempertahankan wilayah itu menjadi bagian dari negara RRC. Proyek '*nation-building*' Cina harus berhasil, karenanya men-Cina-kan Uyghur merupakan taruhan besar bagi Cina. Jika proyek ini tidak berhasil, Beijing akan mengalami kerugian besar, tidak saja bagi pembangunan ekonominya, namun juga dalam rangka mempertahankan Cina bersatu. Selain Xinjiang, Cina masih memiliki masalah dengan beberapa wilayah yang memiliki tendensi sentrifugal, yaitu Taiwan, Tibet dan Mongolia. Sekalipun dalam tingkat tertentu Taiwan diakui lebih 'mandiri', Tibet dan Mongolia 'bernasib sama' dengan Xinjiang. Kontrol Cina yang semakin meningkat di Asia Timur merupakan kesempatan yang digunakan Beijing untuk semaksimal mungkin mengendalikan situasi yang berkembang di Xinjiang.

Setelah 1990, kebijakan Cina pada Xinjiang semakin terfokus pada kekhawatirannya atas tuntutan kemerdekaan kaum Uyghur. Salah satu strategi Cina untuk menghalangi kemerdekaan Uyghur adalah dengan melakukan in-migrasi suku Han ke Xinjiang. Mendorong migrasi etnis dominan ke tengah-tengah etnis minoritas adalah cara klasik yang dilakukan negara dalam rangka mengintegrasikan suku minoritas dengan mayoritas. Cara ini selain merupakan cara termudah, juga dianggap paling menjanjikan keberhasilan. Selain untuk percepatan asimilasi, kedatangan suku Han ke Xinjiang diharapkan mampu memicu pertumbuhan ekonomi di Xinjiang, apalagi Xinjiang merupakan salah satu provinsi termiskin pada masa pemerintahan Mao Zedong. Kemiskinan di Xinjiang merupakan indikasi bahwa wilayah selatan (*Nanjiang*) ini tidak terlalu mendapat perhatian pemerintah sehingga nampak kesenjangan dengan wilayah utara (*Beijiang*). Bequelin (2000: 68) menyatakan,

Until 1995 only one decent road penetrated the south, linking Urumqi to Kashgar and then extending toward Hetian and the easternmost oases in a horseshoe pattern. The southern region remains overwhelmingly rural, with farmers mainly cultivating oasis lands. Standards of living are much lower than in the north, and numerous districts fall well below the national poverty threshold.

Kontrol Cina atas Xinjiang sebelah utara relatif lebih berhasil dibandingkan dengan di wilayah selatan, yang gerakan pemisahan diri bergerak lebih dinamis dan kurang mendapat perhatian di masa Mao Zedong. Sebuah laporan yang disunting oleh Yang Faren, Li Ze and Dong Sheng yang berjudul *Fan yisilanzhuyi, fan tujuezhuyi yanjiu (Research on Pan-Islamism and Pan-Turkism)* yang diterbitkan di Urumqi oleh Xinjiang Shehui Kexue Yuan, tahun 1994 menyatakan bahwa:

...the most important lesson identified was that for a long time, our Autonomous Region did not have a unified vision that national separatism is the main danger for Xinjiang ... The task of fighting ethnic separatism has not been carried out in a top-to-bottom fashion. This lesson is very important, and we still need to pay full attention to it today" (Baquelin 2000: 69).

Menguatnya tuntutan pemisahan diri Uyghur menyebabkan Beijing menambah populasi suku Han di Xinjiang. Beijing menetapkan strategi internal dan eksternal (*nei wai zhanlue*) untuk membendung kuatnya arus sentrifugal Uyghur di Xinjiang dan kecenderungan persatuan Uyghurisme di sekitarnya.

Tidak lama setelah keruntuhan Uni Soviet, Cina menjalin hubungan diplomatik dengan Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan dan membentuk "Group of Five" (*wu guo*) dengan tiga negara ini dan Rusia. Tujuan utama pembentukan kelompok ini adalah untuk menetapkan masalah perbatasan dengan negara-negara baru tersebut, kerja sama ekonomi dan untuk keamanan regional. Isu pemisahan diri tentu tidak terelakkan menjadi agenda penting dari "Group of Five." Beijing berharap banyak dari kelompok ini. Selain berharap keberlangsungan kerja sama energi, juga mengirimkan sinyal diplomatik agar negara-negara baru ini mampu bekerja sama dengan Beijing untuk mempertahankan kedaulatannya di Xinjiang yang memungkinkan tuntutan merdeka tidak mendapatkan simpati dari negara-negara baru tersebut. Salah satu hal yang untuk sementara ini tidak terlalu khawatir mengenai dukungan atas kemerdekaan Uyghur adalah kurangnya dukungan dari negara-negara baru tersebut pada Uyghur.

Simpulan

Tiga hal paling mendasar yang menjadi alasan bagi pemerintah Cina untuk mempertahankan wilayah Xinjiang dan mencegah meluasnya gerakan Pan-Uyghurisme berkembang di Cina bagian barat adalah masalah identitas, sumber daya alam dan geografi. Tiga faktor tersebut merupakan pendorong

utama Cina dalam mengambil setiap kebijakan yang berkaitan dengan wilayah Xinjiang. Ketakutan Cina akan efek domino disintegrasi Yugoslavia dan Uni Soviet dan kekhawatiran mengeringnya sumber-sumber minyak telah menyebabkan Cina mengambil dua kebijakan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, Cina masih mempertahankan sikap represi terhadap menguatnya revivalisme Islam di Asia Tengah, terutama semenjak peristiwa September 11; di sisi lain Cina berupaya mengambil hati kaum Uyghur di Xinjinag dengan cara memberi prioritas pembangunan pada provinsi tertinggal itu agar mereka bersedia meredam keinginannya untuk mendirikan negara merdeka.

Sekalipun demikian, sampai saat ini Beijing belum dapat sepenuhnya dikatakan berhasil, terbukti dengan beberapa kejadian yang secara sporadis menandai masih hidupnya semangat berpisah kaum Uyghur dari Cina. Hal ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi pemerintah komunis di Beijing karena semakin lama pemberontakan ini tidak dapat diatasi, 'nasib' pembangunan nasional Cina di ujung tanduk. Berbagai eksese negatif dari kegagalan Beijing dalam mengatasi konflik di Xinjiang akan berdampak bagi maa depan pemerintah komunis dan keberlangsungan negara Cina yang saat ini sedang merambisi menjadi negara terkuat di berbagai bidang.

Daftar Pustaka

- Alptekin, E (2008) Is Eastern Turkestan a Chinese Territory? [Diakses 6 November 2010] <http://www.uyghurnews.com/canadian/Read.asp?UighurNews=is-xinjiang-a-chinese-territory-&ItemID=CJ-31520086485729307868>.
- Bhattacharya, A (2003) Conceptualising Uyghur separatism in Chinese nationalism. *Strategic Analysis* 27(3): 357-381.
- Baranovitch, U (2003) From the margins to the centre: the Uyghur challenge. *The China Quarterly* 175: 726-750.
- Bequelin, N (2000) Xinjiang in the nineties. *The China Journal* 44: 65-90.
- Conway, J (2010) The Uyghur and the scholars: competing narratives of ethno-religious identity. Thesis Master of Arts, Queen's University, Ontario.
- Klare, MT (2001) The new geography of conflicts. *Foreign Affairs* 80(3): 49-61.
- Prakash, A (2010) China to double Xinjiang spending to boost stability (Update1). [Diakses 10 November 2010]. <http://www.businessweek.com/news/2010-05-21/china-to-double-xinjiang-spending-to-boost-stability-update1-.html>.
- Raman, B (2002) US and terrorism in Xinjiang. *South Asia Analysis Group* 499. [Diakses 10 November

- 2010]. <http://www.southasiaanalysis.org/papers5/paper499.html>.
- Singh, B (2010) Ethnicity, separatism, and terrorism in Xinjiang: China's triple conondrum. The Institute of Peace and Conflict Studies (IPCS) 96. New Delhi, IPCS.
- Uyghur American Association (2010) About China. [Diakses 12 November 2010]. <http://www.uyghuramerican.org/categories/About-Uyghurs/>.
- Yuxin, L (2008) The status quo and prospects of regional economic cooperation between china's xinjiang and neighboring countries under the framework of the Shanghai Cooperation Organization. *International Journal of Business and Management* 3(1), [Diakses 10 November 2010], <http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/viewFile/1896/1800>.
- Zweig, D & Bi, J (2005) China's global hunt for energy. *Foreign Affairs* 84 (5): 24–38.